



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**



TIAKUR
28 DESEMBER 2023



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
- 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
- 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertubahan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku;
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 19 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
13. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
17. Belanja barang dan jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa

yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

18. Belanja hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Belanja bantuan sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
20. Belanja operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
21. Belanja modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
22. Belanja tidak terduga adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

23. Belanja transfer adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antara lain: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pasal 2

APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.089.641.403.458,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah;

Pasal 4

- (1). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp136.540.377.157,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.154.429.960,00
- (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.776.923.520,00

- (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.302.193.641,00
- (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp54.306.830.036,00

Pasal 5

- (1). Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp67,154.429.960,00 yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2). Pajak hotel Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.448.000.000,00
- (3). Pajak restoran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.904.000.000,00
- (4). Pajak hiburan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.634.406,00
- (5). Pajak reklame Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.723.346.841,00
- (6). Pajak penerangan jalan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.459.260.000,00
- (7). Pajak mineral bukan logam dan batuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.150.558.713,00

- (8). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.394.630.000,00

Pasal 6

- (1). Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.448.000.000,00 terdiri atas:
- a. Pajak Hotel Rp3.448.000.000,00
- (2). Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.904.000.000,00 terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp12.904.000.000,00
- (3). Anggaran pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.634.406,00 terdiri atas:
- a. Pajak Permainan Biliar Rp9.634.406.000,00
- (4). Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.723.346.841,00 terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp1.723.346.841,00
- (5). Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.459.260.000,00 terdiri atas:
- a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp3.459.260.000,00
- (6). Anggaran pajak Mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.150.558.713,00 terdiri atas:
- a. Pajak Batu Kapur Rp10.167.500.000,00
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil Rp13.284.667.800,00
 - c. Pajak Tanah Serap Rp7.350.639.790,00

- d. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Lainnya
Rp10.347.751.123,00
- (7). Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp4.394.630.000,00

Pasal 7

- (1). Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp8.776.923.520,00
yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi jasa perizinan tertentu.
- (2). Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp183.416.000,00
- (3). Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp7.054.507.520,00
- (4). Retribusi jasa perizinan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp1.539.000.000,00

Pasal 8

- (1). Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c
direncanakan sebesar Rp6.302.193.641,00 yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
(Lembaga Keuangan) sebesar Rp6.302.193.641,00

Pasal 9

- (1). Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp54.306.830.036,00 yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain;
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- (2). Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.546.036.200,00
- (3). Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.739.926.077,00
- (4). Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.335.382.043,00
- (5). Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.521.812.608,00
- (6). Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.157.627.123,00
- (7). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11,978.045,985,00
- (8). Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.000.000,00

- (9). Pendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp26.000.000,00

Pasal 10

- (1). Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp864.785.347.440,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2). Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp852.578.632.000,00
- (3). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.206.715.440,00

Pasal 11

- (1). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp38.321.708.372,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
- (2). Pendapatan hibah sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.049.632.800,00
- (3). Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp6.272.075.572,00

Pasal 12

- (1). Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp32.049.632.800,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

- (2). Pendapatan hibah dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.049.632.800,00

Pasal 13

- (1). Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp6.272.075.572,00 yang terdiri dari atas:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
- (2). Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.272.075,00

Pasal 14

- (1). Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.089.641.403.458,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja tidak terduga;
 - d. Belanja transfer;

Pasal 15

- (1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp 649.601.867.434,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bunga
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diencanakan sebesar Rp355.171.145.041,00

- (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 238.941.612.698,00
- (4). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.803.735.747,00
- (5). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.685.373.948,00

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp260.137.831.614,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal Tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00
- (3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25.035.157.050,00
- (4). Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 41.349.433.299,00
- (5). Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 184.961.296.865,00
- (6). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.312.671.400,00

- (7). Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.479.273.000,00

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00

Pasal 18

- (1). Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp169.901.704.410,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.901.704.410,00

Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp84.172.542.157,00 yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

- (1). Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a di rencanakan sebesar Rp84.172.542.157,00 yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sebesar Rp 84,172,542,157,00

Pasal 21

- (1). Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b di rencanakan sebesar Rp34.178.571.668,00 yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
 - b. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah.

Pasal 22

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus / (defisit) sebesar Rp(49.993.970.489,00)
- (2). Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.993.970.489,00

Pasal 23

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;


Pasal 24

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tiakur, 28 Desember 2023
BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur

Pada tanggal 28 Desember 2023

J. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



Drs. DAUD REIMIALY

NIP. 19651019 199503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 74



KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.540.377.157,00
4.1.01	Pajak Daerah	67.154.429.960,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.448.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	3.448.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	3.448.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	12.904.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.904.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.904.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	9.634.406,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	9.634.406,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	9.634.406,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.723.346.841,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.723.346.841,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.723.346.841,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.459.260.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.459.260.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.459.260.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	65.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	65.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	65.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.150.558.713,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	10.167.500.000,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	10.167.500.000,00
4.1.01.14.05	Pajak Batu Apung	0,00
4.1.01.14.05.0001	Pajak Batu Apung	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	13.284.667.800,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	13.284.667.800,00
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	7.350.639.790,00
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	7.350.639.790,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.347.751.123,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.347.751.123,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.394.630.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.394.630.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.394.630.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.776.923.520,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	183.416.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	122.568.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	122.568.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	60.848.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	60.848.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.054.507.520,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.536.010.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	6.161.010.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	375.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	212.880.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	212.880.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	205.617.520,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	205.617.520,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.539.000.000,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15.000.000,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	24.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	24.000.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.000.000.000,00
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	350.000.000,00
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	650.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.302.193.641,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.302.193.641,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.302.193.641,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.302.193.641,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.306.830.036,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.546.036.200,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	4.546.036.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	4.546.036.200,00
4.1.04.05	Jasa Giro	5.739.926.077,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.786.929.223,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.786.929.223,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	952.996.854,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	952.996.854,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	12.335.382.043,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	12.335.382.043,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	12.335.382.043,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.521.812.608,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	7.397.940.130,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	7.397.940.130,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.123.872.478,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.123.872.478,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.157.627.123,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.157.627.123,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.157.627.123,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	11.978.045.985,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	11.978.045.985,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	11.978.045.985,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	2.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	26.000.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	26.000.000,00
4.1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	26.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	864.785.347.440,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	852.578.632.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	729.297.905.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.111.733.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	777.817.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.808.020.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	98.217.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	8.723.927.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	277.375.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	8.426.377.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	574.770.795.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	394.827.455.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	200.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	28.046.637.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	56.794.486.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	32.380.666.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	62.521.551.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	59.493.960.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	526.494.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.488.835.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.258.389.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3.149.939.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	24.207.808.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	664.983.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.447.512.000,00
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	9.500.000.000,00
4.2.01.01.03.0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	3.250.000.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73.921.417.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.359.550.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	890.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	9.319.281.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.971.412.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	12.549.771.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.679.540.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	87.260.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.393.133.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	13.481.858.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.189.612.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	101.079.613.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	101.079.613.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	101.079.613.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.201.114.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	22.201.114.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	22.201.114.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.206.715.440,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	12.206.715.440,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.206.715.440,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.282.239.057,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	569.937.858,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.354.538.525,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.321.708.372,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	32.049.632.800,00
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	32.049.632.800,00
4.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	32.049.632.800,00
4.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	32.049.632.800,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.272.075.572,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.272.075.572,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.272.075.572,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.272.075.572,00
	Jumlah Pendapatan	1.039.647.432.969,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	649.601.867.434,00
5.1.01	Belanja Pegawai	355.171.145.041,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	278.417.778.915,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	208.909.805.593,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	156.988.090.921,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	51.921.714.672,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.435.189.516,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.196.995.996,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.238.193.520,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.969.791.465,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.969.791.465,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.634.594.160,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.908.824.160,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.725.770.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.622.447.100,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.617.869.100,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.578.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.776.665.886,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.969.401.646,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.807.264.240,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	785.893.310,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	785.893.310,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.797.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.056.141,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	740.959,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	8.700.340.818,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	6.531.797.872,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.168.542.946,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	484.586.314,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	379.253.034,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	105.333.280,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.396.667.653,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.079.401.067,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	317.266.586,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	694.000.000,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	694.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	23.453.479.789,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.801.618.831,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.801.618.831,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.614.346.372,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.614.346.372,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	37.514.586,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	37.514.586,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.695.552.396,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	9.319.281.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	9.319.281.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.549.771.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	12.549.771.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.715.390.032,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.715.390.032,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.111.110.364,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.665.740.364,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	445.370.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.387.414.431,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.920.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.920.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.180.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.180.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	71.160.800,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	71.160.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.244.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.244.100,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	330.000.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	330.000.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	28.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	28.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.293.431,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	115.200.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.083.096,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.249.288,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.282.761.047,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.951.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.951.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	185.535.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	185.535.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.165.010,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.790.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.790.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.790.600,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.790.600,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.176.800,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.176.800,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.327.696,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.327.696,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.170.250,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.170.250,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.384.104,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.384.104,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	2.421.154.500,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	2.421.154.500,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	2.421.154.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.941.612.698,00
5.1.02.01	Belanja Barang	62.922.047.761,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.847.047.761,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.283.811.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.996.175.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.990.130.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.043.808.246,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.376.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.466.685.437,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	838.012.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.200.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.077.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	663.488.200,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	211.740.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	111.940.500,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.755.445.575,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	602.535.449,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.862.974.504,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.278.673.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.528.138.800,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.005.940.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.098.844.750,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.663.551.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	148.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	400.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	229.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	475.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	75.000.000,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	75.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	81.045.259.678,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.594.092.315,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.121.298.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.678.140.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	37.244.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	334.930.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	151.999.500,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.047.471.792,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	52.996.240,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	66.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.585.860.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	400.099.120,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.102.280.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	78.999.120,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	142.200.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	69.762.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	119.281.800,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	314.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	442.740.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.061.100.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.642.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.963.852.500,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	413.024.978,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	997.775.265,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.461.938.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	225.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.924.658.643,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.263.747.363,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.660.911.280,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	133.000.000,00
5.1.02.02.03.0025	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	28.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	105.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.741.393.720,00
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	36.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	934.667.200,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.450.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	35.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	40.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	72.513.868,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	17.612.652,00
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	78.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	66.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	967.750.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	160.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	341.250.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.700.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	88.800.000,00
5.1.02.02.05.0046	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	80.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	192.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	12.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	480.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	225.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	255.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	266.240.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	266.240.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.926.125.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	444.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	128.750.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	356.050.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	996.825.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.084.816.200,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.823.153.900,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	6.200.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.331.340.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.619.020.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	157.255.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	93.660.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	578.178.900,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.261.662.300,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.230.964.300,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	27.818.000,00
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	2.880.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.605.775.731,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.605.775.731,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.605.775.731,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.611.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.611.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	204.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	5.407.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.968.810.628,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.968.810.628,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.968.810.628,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.703.902.700,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.703.902.700,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.703.902.700,00
5.1.03	Belanja Bunga	10.803.735.747,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	10.803.735.747,00
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	10.803.735.747,00
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	10.803.735.747,00
5.1.05	Belanja Hibah	44.685.373.948,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.289.903.840,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	40.589.903.840,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	40.589.903.840,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.500.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.500.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.200.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.200.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	395.470.108,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	395.470.108,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	395.470.108,00
5.2	BELANJA MODAL	260.137.831.614,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00
5.2.01.01.02.0007	Belanja Modal Tanah Pertanian	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.000.000.000,00
5.2.01.01.03.0006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	1.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.035.157.050,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	306.100.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	306.100.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	306.100.000,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.374.647.850,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.374.647.850,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.668.578.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.081.259.850,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	417.000.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.157.810.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	64.960.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	64.960.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	64.960.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.886.349.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.392.300.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.388.800.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.381.387.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.248.350.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	23.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	167.100.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	40.350.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	878.345.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	23.742.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	112.662.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	55.700.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	39.762.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	17.200.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	541.539.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	482.864.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	211.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	153.864.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	59.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	59.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	58.675.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	58.675.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.765.978.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.600.633.600,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	180.000.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.070.694.600,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	30.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	100.000.000,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.649.939.000,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	250.000.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	320.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.165.344.400,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.165.344.400,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	163.650.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	113.850.000,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	113.850.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	49.800.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	27.000.000,00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	22.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.142.606.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.599.095.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	947.946.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	651.149.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	543.511.500,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	209.961.500,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	333.550.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.789.326.700,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.789.326.700,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.789.326.700,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.349.433.299,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	40.209.433.299,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.325.693.299,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.912.000.000,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	469.150.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.000.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.525.608.500,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.028.584.799,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	217.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	317.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	9.505.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	41.850.000,00

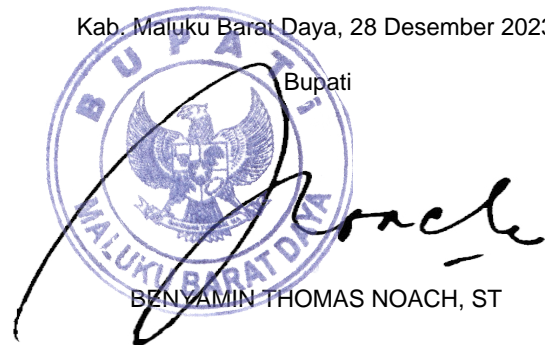
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	70.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.124.500.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.085.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.883.740.000,00
5.2.03.01.02.0009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	6.688.740.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	195.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.140.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.140.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.140.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.961.296.865,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	115.620.657.451,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	105.659.697.451,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	105.247.697.451,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	412.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	9.960.960.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.271.600.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	689.360.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	63.399.439.414,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	33.016.632.800,00
5.2.04.02.02.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	267.000.000,00
5.2.04.02.02.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	32.749.632.800,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	23.124.456.614,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	23.124.456.614,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.639.600.000,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	3.389.600.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	250.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.618.750.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.618.750.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.941.200.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.941.200.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.941.200.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.312.671.400,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	330.914.500,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	330.914.500,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	248.414.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	82.500.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	118.450.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	118.450.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	118.450.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	6.250.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	6.250.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	6.250.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	857.056.900,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	857.056.900,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	857.056.900,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.479.273.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	6.479.273.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	6.479.273.000,00
5.2.06.01.01.0004	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	1.608.793.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	150.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	945.480.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.775.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	169.901.704.410,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	169.901.704.410,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	169.901.704.410,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	169.901.704.410,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	101.079.613.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	68.822.091.410,00
	Jumlah Belanja	1.089.641.403.458,00
	Total Surplus/(Defisit)	-49.993.970.489,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84.172.542.157,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.172.542.157,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	84.172.542.157,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	84.172.542.157,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	84.172.542.157,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	34.178.571.668,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.178.571.668,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	29.178.571.668,00
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	29.178.571.668,00
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	29.178.571.668,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	34.178.571.668,00
	Pembiayaan Netto	49.993.970.489,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Maluku Barat Daya, 28 Desember 2023

Bupati



BENYAMIN THOMAS NOACH, ST